

**SKRIPSI**

**PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAKSANAAN TATA  
KELOLA PEMERINTAHAN DI KANTOR BUPATI  
KABUPATEN LUWU TIMUR**



**Disusun Oleh :**

**ELMAWATI  
105611117418**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

SKRIPSI

**PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAKSANAAN TATA  
KELOLA PEMERINTAHAN DI KANTOR BUPATI  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S. A.P)

Disusun Oleh:  
ELMAWATI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611117418

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN SEMESTER AKHIR**

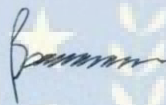
Judul Skripsi : Penerapan E-government Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Elmawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 10561117418

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

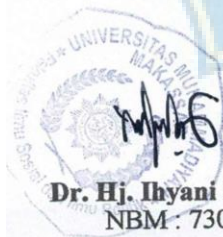


Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

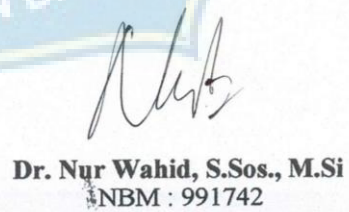
Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

Dekan

Ketua Program Studi



**Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si**  
NBM : 730727



**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**  
NBM : 991742

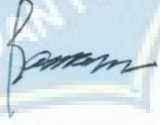
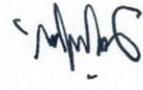

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0174/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023

**TIM PENILAI**

Ketua	Sekretaris
 <b>Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si</b> NBM: 730727	 <b>Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si</b> NBM : 992797

Tim Penguji :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M. Si (  )
2. Dr. HJ. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si (  )
3. Dr. Haerana, S. Sos., M.Pd (  )

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Elmawati

Nomor Induk Mahasiswa : 105611117418

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 21 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Elmawati

## ABSTRAK

**Elmawati (2023). Penerapan E- Government Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur.**  
(Dibimbing oleh lukman, dan Samsir)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan E-government Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-government* dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di kantor bupati Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:1) Indikator support, Diskominfo Kabupaten Luwu Timur sudah mengaplikasikan *e-government* sebagai tata kelola pemerintahan di kantor bupati Kabupaten Luwu Timur baik dari segi aturan yang mengatur, partisipasi dengan pemerintah dalam penerapan *e-government*.

2) Indikator Capacity, Diskominfo Kabupaten Luwu Timur memiliki sumber daya manusia, sumber daya keuangan, infrastruktur jaringan yang belum optimal. Ini disebabkan karena faktor sumber daya manusia yang kurang kompeten, dukungan anggaran yang membatasi pelaksanaan program serta kepedulian masyarakat yang masih rendah. 3) Indikator Value, manfaat dalam pelayanan informasi publik baik secara offline maupun online yang dilakukan oleh diskominfo sudah di laksanakan secara maksimum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah itu sendiri, begitu juga masyarakat.

Kata kunci: Penerapan, Tata kelola, e-government.



## ABSTRACT

Elmawati (2023) **Application Of E-Government In The Implementation Of Governance At The East Luwu Regency Regent's Office. (Supervised by Lukman, and Samsir)**

This study aims to determine the application of e-government in the implementation of governance at the East Luwu District Head Office. The results of this study indicate that the application of e-government in the implementation of governance in the East Luwu district district office can be seen from the following indicators: 1) Support indicator, the East Luwu District Office of Communication and Information has implemented e-government as governance in the district head's office East Luwu Regency both in terms of governing rules, participation with the government in implementing e-government.

2) Capacity Indicator, Diskominfo East Luwu Regency has human resources, financial resources, network infrastructure that is not yet optimal. This is due to incompetent human resources, budget support that limits program implementation and low public awareness. 3) Value indicator, the maximum benefits in public information services both offline and online carried out by Diskominfo have been implemented, so that the benefits can be felt by the government itself, as well as the community.

*Keywords: implementation, governance, e-government.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini, bukti dari perjuangan yang panjang dan jawaban atas do'a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Solawat serta salam juga peneliti sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang biadab menuju alam yang beradab, yang telah menggulung tikar-tikar kebodohan dan membentangkan tikar-tikar kebenaran.

Skripsi dengan judul **“Penerapan E-Government Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu tercinta Ibunda Hasna yang telah berjuang demi kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa



meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan segala ilmu yang dimiliki selama proses pembelajaran di kampus sehingga dapat menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis ke depan.
6. Bapak Bupati Luwu Timur **Drs. H. Budiman Hakim Andi Baso, M.Pd.** atas bantuan yang di berikan berupa izin melaksanakan penelitian.
7. Staff Kantor Bupati Luwu Timur atas segala bantuan selama peneliti melaksanakan penelitian.
8. Seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.
9. Saudari Vivian safitri S.Hut dan Zulvikram Parawangsa S.Hut yang selama ini sudah membantu penulis dalam menyusun skripsi dengan tulus dan ikhlas..
10. Teman-teman ADN 018 yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.

saya sebutkan satu-satu yang telah membantu penulisan dengan ikhlas dalam penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.



Makassar, 21 Januari 2023

  
Elmawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIANM AKHIR</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat praktis.....	S
<b>BAB II TINJAUN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Teori Dan Konsep .....	14
C. Kerangka Fikir.....	34
D. Fokus Penelitian .....	34
E. Deskripsi Fokus Penelitian .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	36
C. Sumber Data .....	37
D. Informan Penelitian .....	37
E. TeknikPengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	40
G. Pengabsahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>

A. Profil Objek Penelitian .....	42
1. Profil Kabupaten Luwu Timur .....	42
2. Administrasi Pemerintahan .....	43
3. Organisasi Perangkat Daerah .....	45
4. Penduduk .....	47
5. Pendidikan .....	47
6. Potensi Pengembangan Wilayah .....	48
7. Visi & Misi .....	53
B. Hasil Penelitian .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>73</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab akan kemajuan daerahnya setempat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, hal inilah yang dimaksud dengan otonomi daerah. Pemerintah diharuskan bisa menjadi lebih baik untuk mengikuti perkembangan yang semakin maju, untuk mengimbangi hal tersebut maka muncullah istilah pemerintahan yang berbasis elektronik atau dengan kata lain (*E-Government*)

Penyelenggaraan *E-Government* di Indonesia telah dimulai saat sebelum adanya inpres No. 3 Tahun 2003, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan jaringan telpon. Pemerintah menyadari akan manfaat penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah (*Good Governance*). Penyelenggaraan ini membuka cakrawala baru dalam keterbukaan dan daya tanggap dikalangan pemerintah serta tanggung jawab pemerintah. Di Indonesia, inisiatif menerapkan *E-government* diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang telematika (Telekomunikasi, Media,dan Informasi).

Kemudian keluarnya instruksi presiden RI No.3 Tahun 2003 Tentang kebijakan dan stratengi nasional pengembanagan *E-government* yang diinstruksikan kepada: Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekriterian Lembaga Tertinggi Dan Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksannya pengembangan *E-Government* secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan pemenuhan segala aspek untuk menuju Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*) yang baik guna melakukan pelayanan yang maksimal. Pesatnya kemajuan teknologi juga dapat membuat masyarakat dapat mengetahui informasi dengan sangat cepat. Sebagai akibatnya terjadi tekanan dari masyarakat kepada pemerintah untuk lebih memanfaatkan dan memperbaiki kinerja pemerintah, dengan ini muncullah sistem *E-Government* sebagai akibat tekanan dari masyarakat.

Dengan menerapkan sistem *E-government*, maka masyarakat dapat memantau aktifitas dari apa yang direncanakan dan telah dilakukan oleh pemerintah, kemudian akan memicu kinerja pemerintah yang jauh lebih baik. Pemanfaatan *E-government* sendiri dapat meeningkatkan efektifitas dan efisiensi dari kinerja aparat pemerintah, arus informasi yang cepat, dan adanya media yang menampung selaga aspirasi dari seluru masyarakat

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 tentang Kebijakan dan Strategi Nasiona Pengembangan *E-Government* yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses



pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kemudian Peraturan Pemerintah N0.56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah dijelaskan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan sistem *E-Government* dalam penataan tata kelola pemerintah harus dijalankan dengan baik, jika hal ini dapat berjalan dengan semestinya maka *Good Governance* dapat terwujud. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *E-Government* merupakan suatu perwujudan untuk menyukseskan tata kelola pemerintah.

Dalam laporan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) sebuah laporan Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kembali mempublikasikan peringkat *E-Government Development index* (EGDI) berdasarkan survei tahun 2018 ([www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)). Pada tahun ini Indonesia menempati posisi ke-107 EGDI, naik ke-9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat ke-116. Indonesia menempati peringkat ke-7 di *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) setelah Vietnam. Peringkat Indonesian ini masih berbeda jauh di bawah negara-negara di ASEAN lainnya seperti Singapura (peringkat ke-7 EGDI), Malaysia (perinngkat ke-48 EGDI), Brunei

Darussalam (peringkat ke-59 EGDI), Thailand (peringkat ke-73 EGDI), Philippines (peringkat ke-75 EGDI), dan Vietnam (peringkat ke-88 EGDI).

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berkomitmen menerapkan e-Government melalui sistem aplikasi Open Data, disposisi online, absensi online, sistem keuangan, sistem perencanaan, layanan e-Government melalui sistem Open Data ini penting dilakukan untuk mendorong pelayanan publik yang terintegritas dan transparan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika juga berkomitmen menerapkan sistem Open Data dalam menyusun perencanaan dan juga penganggaran dalam mewujudkan e-Government. Pemkab Luwu Timur perlu melibatkan partisipasi beberapa stakeholder teknis terkait. Dalam penganggaran kami terapkan analisa terpadu melalui mekanisme keterlibatan masyarakat, SKPD yang terintegrasi pada satu sistem e-Musrenbang.

Sistem perencanaan juga didukung sistem teknologi seperti portal data, berbagai aplikasi pengaduan. “Sistem tersebut menghasilkan berbagai inovasi dalam transparansi pengelolaan SDM dan pemerintahan *e-Government* tersebut telah tertuang dalam Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2017 yang akan menjadi acuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Pemkab Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur sudah menerapkan *E- Government* sejak tahun 2020 dalam pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*). ([www.lutimkab.go.id](http://www.lutimkab.go.id)). Sistem informasi ini sangat penting, karena berperan sebagai pendukung fungsi pemerintah dalam mewujudkan

pelayanan yang baik untuk masyarakat. Dengan adanya sistem yang diterapkan di instansi pemerintah di Kabupaten Luwu Timur maka masyarakat akan dengan mudah mengakses informasi terkait dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah seperti informasi kebijakan dan program-program yang sudah atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Namun sejauh ini E-government yang di terapkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum terlalu terekspos kemasarakat sehingga banyak masyarakat tdk mengetahui program layanan pemerintah ini. Minimnya akses informasi yang ada pada portal resmi Kabupaten Luwu Timur ([www.lutimkab.go.id](http://www.lutimkab.go.id)). juga menjadi salah satu perhatian dimana pemerintah selaku pelayanan publik harus mengedepankan keterbukaan peyedia informasi bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal adanya tuntutan transparansi dari pihak masyarakat terkait dengan pengelolah tatanan pemerintah. Dengan adanya keterbukaan maka arus informasi dapat terlaksanakan secara seimbang yaitu antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui seluruh informasi terkait dengan keputusan dan kepentingan publik dengan aktif. Riva dalam Sedermayanti (2016; 4), adanya permasalahan tersebut juga mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya dalam peningkatan kualitas. Untuk itu perlu adanya berorientasi kepada pengedepanan proses Tata Kelola pemerintah (*Good governance*) dalam pengelolaan layanan publik. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa penerapan *E-government* bukan hanya sekedar mengikuti aturan lalu lepas tanggungjawab begitu saja melainkan membutuhkan konsisten, bahwa sejauh mana pemerintah mampu mengembangkan dan menjaga eksistensi.

Maka pada dasarnya tuntutan akan terlaksananya tata kelola yang baik bagi pemerintah sangat wajar, pemerintah harus dengan bijak memperhatikan apa yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pemerintah dengan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat. Dengan adanya E-government pemerintah memiliki harapan baru dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan (*Good Governance*)

Menurut Effendi dalam Sedarmayanti (2016:5) permasalahan-permasalahan dalam implementasi otomi daerah yang telah dipaparkan, mencerminkan lemahnya akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Permasalahan ini juga mencerminkan bahwa secara nyata tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) pada dasarnya tidak terlaksanakan dengan baik atau dengan kata lain *Bad Governance*. Untuk itu perlu adanya hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor dan masyarakat

Untuk itu di perlukan tata kelola pemerintah yang sejalan dengan perubahan yang terjadi di era transisi global. Pemerintah juga perlu membenahi peraturan-peraturan yang telah dibuat agar menjauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan rakyat. Selain itu, masyarakat dan birokrasi dituntut saling menyesuaikan diri agar terjadi sebuah relasi yang menghasilkan perdamaian yang produktif serta saling menghargai. Oleh sebab itu, di perlukan sebuah perubahan-perubahan yang baru dalam mewujudkan pemerintah yang baik serta dapat menyesuaikan dengan arus perkembangan zaman. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul; **“Penerapan E-**

## **Government Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menetapkan permasalahan yang akan diteliti, Bagaimana Penerapan E-Government Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan E-government Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya dalam bidang *E-government* dan dapat dijadikan bahan referensi peneliti selanjutnya yang Penerapan *E-government* Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini ialah menambah wawasan memahami terkait Penerapan *E-Government* Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Dengan Baik.

b. Bagi Instansi

Manfaat penelitian bagi instansi ialah sebagai masukan dan menjadikan pertimbangan bagi pemerintah terkait Penerapan *E-Government* Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah yang baik.





## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan Penerapan *E-government* dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah, yakni melalui beberapa penelitian yang menjadi bahan perbandingan;

1. Berlian Maulidya Izzati( 2017) dengan judul penelitian “Analisis pengaruh kualitas layanan *public E-Government (Government To Citizen)* terhadap penciptaan public value (studi kasus :kota surabaya )” Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap model pengukuran dan model structural, diketahui bahwa terdapat hubungan signifikan antara kualitas layanan publik *E-Government* terhadap penciptaan *publik value* dengan signifikan nilai *path coefficient* yang tertinggi sebesar 0,454 dan t-statistic sebesar 3.785. Selain itu juga terdapat hubungan signifikan antara *Effective of public organization* terhadap *publicvalue* dengan signifikan nilai *path coefficient* sebesar 0.267 dan t-statistic sebesar 2.303; serta *information quality* terhadap *quality of public service in e-government* dengan signifikan nilai *path coefficient* yang tertinggi sebesar 0.454 dan t-statistic sebesar 3.785”.
2. Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Putu Eka Purnamaningsi, dengan judul penelitian “Penerapan Pelayanan public berbasis *E-Government* dalam prongram layanan perizinan online (laperon) di DPMPTSP Kabupaten Bandung (2022) ’Perkembangan teknologi ini mengubah banyak kebiasaan

dari masyarakat. Bukan saja mengubah kebiasaan masyarakat kemajuan teknologi ini juga memberikan dampak pada sektor pelayanan publik kemajuan teknologi ini meregenerasi pemerintahan yang bersifat konvensional kearah *E-government* atau *Electronic Government*. *E-government* adalah penggunaan teknologi guna meningkatkan akses serta pengiriman layanan dari pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis dan karyawan yang dapat memberikan manfaat. Di Indonesia sendiri, beberapa daerah telah menerapkan *E-Government* dalam penyelenggaraan pemerintahannya salah satunya adalah Kabupaten Badung Provinsi Bali. Pada Pemerintahan Kabupaten Badung telah menerapkan dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terlihat dari adanya berbagai inovasi sistem yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Badung ini salah satunya yaitu inovasi berupa program “Laperon” (Layanan Perizinan Online) yang bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik. Bali Dwipa, Srikom Bali, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung, dan Zona Integritas dalam masalah perizinan dan non perizinan. Terdapat 122 jenis perizinan dan non perizinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dimana metode ini mempunyai tujuan yaitu menentukan, mengolah, mengumpulkan, dan menganalisis data dari hasil penelitian. Penerapan E-government pada program Laperon berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan sangat baik yang mencapai 90.99 dengan jumlah 1677 responden. Survei

kepuasaan tersebut terdiri dari 11 pertanyaan yang meliputi seputar persyaratan, prosedur, kecepatan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduwan dan sarana dan prasarana “.

3. Surasa (2019), dengan judul penelitian “Tata Kelola Pemerintahan Berbasis *E-Government*”. Penelitian ini bertujuan mengetahui tahap perkembangan *E-Government* berbasis pelayanan di Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2018. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan *E-Government* seperti yang diamanahkan inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Namun demikian implementasi dari pelaksanaan *E-Government* masih memerlukan banyak factor pendukung yang harus dipenuhi, diantaranya adalah jaringan internet yang masih sangat terbatas, peralatan (komputer), dan sumber daya manusia. Masyarakat yang menjadi sasaran dari pelaksanaan *E-Government*, masih belum tersentuh secara maksimal disebabkan minimnya faktor pendukung kualitas pelayanan di Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

Adapun untuk mengetahui atau melihat persamaan dan perbedaan ketiga penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti laksanakan yakni dapat dilihat pada matriks berikut:

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian-Penelitian terdahulu yang relevan**

No.	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Faktor Persamaan	Faktor Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Berlian Maulidya Izzati( 2017) “Analisis pengaruh kualitas layanan <i>public E-Government (Government To Citizen)</i> terhadap penciptaan public value (studi kasus :kota surabaya )”	a. Fokus penelitian b. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif c.Menggunakan informan	a. Lokus penelitian b. Indikator liat dari	Hasil penelitian yang dilakukan terhadap model pengukuran dan model structural, diketahui bahwa terdapat hubungan signifikan antara kualitas layanan publik <i>E-Government</i> terhadap penciptaan <i>public value</i> dengan signifikan nilai <i>path coefficient</i> yang tertinggi sebesar 0,454 dan t-statistic sebesar 3.785
2.	Kadek Wiwin Dwi Wismayanti (2022) Putu Eka Purnamaningsi, denpenelitian “Penerapan Pelayanan public berbasis <i>E-Government</i> dalam prongram layanan perizinan online (laperon) di DPMPTSP	a. Fokus penelitian b. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif c.Menggunakan informan	a. Lokasi Penelitian	Hasil penelitian Penerapan <i>E-government</i> pada program Laperon berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan sangat baik yang mencapai 90.99 dengan jumlah 1677 responden.

No.	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Faktor Persamaan	Faktor Perbedaan	Hasil Penelitian
	Kabupaten Bandung			Survei kepuasan tersebut terdiri dari 11 pertanyaan yang meliputi seputar persyaratan, prosedur, kecepatan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana dan prasarana“.
3.	Surasa (2019), dengan judul penelitian ‘Tata Kelola Pemerintahan Berbasis <i>E-Government</i>	a. Fokus penelitian b. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif c. Menggunakan informan	a. Lokasi penelitian	hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan <i>E-Government</i> seperti yang diamanahkan inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> . Namun demikian implementasi

No.	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Faktor Persamaan	Faktor Perbedaan	Hasil Penelitian
				dari pelaksanaan <i>E-Government</i> masih memerlukan banyak factor pendukung yang harus dipenuhi, diantaranya adalah jaringan internet yang masih sangat terbatas, peralatan (komputer), dan sumber daya manusia

## B. Teori Dan Konsep

### 1. Konsep *E-Government*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menawarkan sebuah solusi bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*). Kesiapan sumber daya manusia, regulasi, anggaran dana, sarana dan prasarana adalah hal mutlak yang harus disediakan dalam penyelenggaraan *E-Government*. Konsep Electronic Governance Electronic Governance adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good governance. E-Governance terdiri dari dua elemen penting yaitu ‘governance’ sebagai konsep utama dan ‘electronic’ atau ICTs (information and communication technologies) sebagai alat untuk meningkatkan proses governance. Word Bank



menyatakan bahwa e-governance mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan badan lain dari pemerintah. Teknologi ini dapat melayani berbagai tujuan yang berbeda seperti pemberian pelayanan yang lebih baik oleh pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan interaksi dengan bisnis dan industri, pemberdayaan warga melalui akses informasi, dan manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Manfaat yang dihasilkan dapat mengurangi korupsi, peningkatan transparansi, kenyamanan yang lebih besar, pertumbuhan pendapatan, dan/pengurangan biaya (Kurniasih & Wismaningtyas, 2020)

Dengan demikian e-governance dapat diartikan sebagai penggunaan ICTs dalam proses governance dimana terdapat banyak sektor yang terlibat (tidak hanya sektor publik tapi juga sektor privat dan sektor non-pemerintah) serta terjadi antar level governance yang berbeda. Tiap level governance terdiri dari tiga sektor yaitu sektor publik/ pemerintah, sektor privat dan sektor nonpemerintah (organisasi non-profit). Dimensi horizontal menunjukkan hubungan antara tiga sektor tersebut dalam level tertentu, sedangkan dimensi vertikal adalah hubungan antara sektor yang sejenis dalam level yang berbeda misalnya sektor publik di level lokal dan nasional. Selain itu hubungan bisa terjadi antar sektor yang berbeda jenis dan antar level yang berbeda pula, misalnya antara sektor publik di level lokal dengan sektor privat di level nasional.

Salah satu definisi e-government dalam khazanah internasional yang cukup banyak dirujuk adalah yang berasal dari publikasi Bank Dunia, yang mendefinisikan e-government yaitu e-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses and other arms of government (Mariono, 2019).

E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain). E-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas (Harakan dkk, 2022). Kaliappen, N., Ghani, A. B. A., Jermittiparsert, K., & Harakan, A. (2021) juga mengemukakan "*E-government involves the application of latest and innovations while the provision of services and other information provision and management systems*".

Shailendra dalam Mariono (2019) definisi sangat umum ini pada dasarnya merujuk penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar hubungan-hubungan tata pemerintahan (*governance*) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat tercipta sedemikian rupa sehingga lebih efisien, efektif,

dan produktif. Disamping itu e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, pusat dan pemerintah federal untuk mendukung operasi pemerintah, pelibatan masyarakat dan penyediaan pelayanan pemerintah. Interaksi ini meliputi pengajuan permohonan, pembayaran dan pelayanan informasi lainnya melalui *world wide web*.

Indrajit dalam Parawu (2020) menjelaskan definisi dari *e-government* menurut World Bank “*E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government*”. *E-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah seperti *Wide Area Network, internet, dan mobile computing* yang memiliki kemampuan untuk mentransformasi hubungan antara warga negara, dunia usaha, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

Suharyana (2017) dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah daerah dituntut secara otonom harus dapat melaksanakan proses transformasi dari penyajian informasi dan komunikasi yang konvensional menuju penyajian informasi dan komunikasi secara elektronik hal ini sesuai definisi dari Bank Dunia, *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah, yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003, pengembangan e-government

diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yaitu ;

- 1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- 3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- 4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Kemajuan teknologi informasi sekarang ini secara perlahan mengubah pola interaksi dan komunikasi yang modern baik antar masyarakat maupun pemerintah dengan masyarakat, hal ini menjadi tugas aparatur pemerintah untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman melalui penyediaan informasi dan pola komunikasi yang lebih baik, efektif dan efisien (Suharyana, 2017).

Nugroho (2016) Implementasi e-government memiliki beberapa tujuan dan sasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip antara lain:

- 1) Peningkatan pemberian layanan pemerintah
- 2) Pemberdayaan masyarakat melalui akses yang lebih besar untuk mendapatkan informasi dari pemerintah dan kemampuan untuk dapat berinteraksi dan berpartisipasi
- 3) Keberhasilan dalam transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari pemerintah
- 4) Peningkatan hubungan internal antara pemerintah dan pengiriman elektronik warga.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pengembangan e-government adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan sektor swasta untuk mengakses layanan pemerintah melalui pemberian layanan yang terintegrasi, efektif dan efisien di mana saja, kapan saja dan dalam bentuk yang nyaman melalui penggunaan internet dan saluran lain seperti ponsel, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik.

Kemudian dalam buku *E-government In Action* yang ditulis oleh Indrajit dalam Muammar (2020) menjelaskan e-government sebagai suatu usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. Oleh karena itu, visi yang dicanangkan harus pula mencerminkan visi bersama dari para stakeholder yang ada misalnya:

- 1) Memperbaiki produktivitas dan kinerja oprasional dalam melayani pelanggannya
- 2) Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparan
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik
- 4) Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis, dan lain sebagainya.

Berdasarkan definisi e-government tersebut dapat dilihat bahwa egovernment identik dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dapat dikatakan juga bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antara pemerintah dan pihak lain.

Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:

- 1) Walaupun sebagai sebuah konsep e-government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka defnisi dari ruang lingkup e-government pun menjadi beraneka ragam;
- 2) Spektrum implementasi aplikasi e-government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;

- 3) Pengertian dan penerapan e-government di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan; dan
- 4) Visi, misi, dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

Masalah defnisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menjadi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan e-government di suatu negara. Terkadang defnisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara defnisi yang terlampau luas dan mengambang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-government.

#### **a. Pengertian *E-Government***

Sistem *E-Government* secara umum di definisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik untuk memudah pemerintah Kumar dan Best dan Heryana (2013:2).



Bank Dunia (*world bank*) dalam Sari Winarmo (2012:2) menuliskan bahwa E-government mengarahkan untuk menggunakan teknologi informasi oleh semua agen pemerintah (seperti internet dan *mobile computing*) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis dan pihak yang terkait oleh pemerintah. Sedangkan *E-Government* menurut indrajit (2004:3) *E-Government* merupakan penggunaan ICT (*Information Communication Technology*) untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.

Hole dalam Nugraha (2018:4) menegaskan bahwa konseptual dari *E-Government* sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (*E-Service*), seperti melalui internet, jaringan telpon dan komputer serta multimedia.

Kemudian dalam buku *E-Government In Action* yang ditulis oleh indrajid (2005:5) menjelaskan *E-Government* sebagai suatu usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. Oleh karena itu visi yang di cadangkan harus pula mencerminkan visi bersama dari para *stakeholder* yang ada misalnya:

- 1) Memperbaiki produktivitas dan kinerja oprasional dalam melayani pelangganya
- 2) Mepromosikan pemerintah yang bersih dan transparan



- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik;
- 4) Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis, dan lain sebagainya.

Menurut indrajid (2002:36) *E-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.

Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-Government ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Berbagai definisi telah dijelaskan dan dipaparkan oleh para ilmuwan diberbagai belahan dunia yang berfokus pada kepentingan masyarakat guna mempercepat proses pelayanan pada masyarakat agar lebih efisien.

Menurut Indrajit (2002:25) penerapan *E-Government* yaitu sebagai berikut

- 1) Data infrastruktur, meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan proses kerja ditempat untuk menyediakan kualitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung penerapan e-government
- 2) Insfrastruktur legal,hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan untuk mendukung menuju e-government
- 3) Insfrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusu pemerintah secara sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam penerapan e-government
- 4) Insfrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan hal pokok yang harus di persiapkan dalam penerapan e-government .
- 5) Insfrastruktur teknologi, penerapan e-government banyak bertumpu pada adanya infrastruktur teknologi yang memadai
- 6) Stratengi pemikiran pemimpin,penerapan e-government sangat membutuhkan pemimpin yang membawa visi e-government dalam agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya. (Indrajit,2002:25).

## **b. Indikator Penerapan *e-government***

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* dalam (Indrajit, 2016), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Support, Capacity, dan Value*.

### 1) Dukungan (*Support*)

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government*. Tanpa adanya unsur "*political will*" ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen "*top down*", maka jelas dukungan implementasi program *e-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya-Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan;
- b) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;
- c) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya kantor *e-Envoy* sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya); dan
- d) Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

## 2) Kemampuan (*Capacity*)

Elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang

paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- a) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
- b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*; dan
- c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

### 3) Nilai (*Value*)

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa. Berbagai inisiatif *e-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh

masyarakat. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha dalam mengembangkan konsep *e-government*.

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan *e-government* yang akan menjadi kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep *e-government* berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi.

### **c. Konsep Tata Kelola Pemerintah (*Good Governance*)**

Tata kelola pemerintahan atau biasa di sebut (*Good Governance*) yang merupakan indikator utam dalam pelaksanaan dan penerapan konsep yang penting bagi organisasi. Hal ini dikarenakan *good governance* memiliki konsep pengelolaan sumber daya manusia, sumberdaya ekonomi dan sosial guna untuk untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pada masyarakat pada suatu bangsa dan merupakan suatu mekanisme yang diharapkan diseluruh belahan di dunia saat ini.

Tata kelola pemerintah (*Good Governance*) di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era

Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersi sehingga Good governance menjadi salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan bar. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan kurang dari 20 tahun ini, penerapan good governance di indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya.

1) Pengertian Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Dalam upaya menghadapi tantangan global saat ini, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah komitmen tinggi dari pemerintah untuk benar-benar menerapkan nilai Good Governance, dalam mewujudkan cita-cita itu UNDP (*United Nations Development Program*) dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010) dalam dokumen kebijaksanaannya yang berjudul “Governance for Sustainable Human Development” (1977) mendefinisikan governance sebagai pelaksanaan kewenangan dalam bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara yang mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesitas sosial dalam masyarakat. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan

pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Sebagai sebuah kata, *governance* sebenarnya tidaklah baru. Pada tahun 1590 kata ini dipahami sebagai *state of being governed*, berkembang menjadi *mode of living* (1600), kemudian menjadi *the office, function, or power of governing* (1643), berkembang menjadi *method of management, system of regulation* (1660) dan kemudian dibakukan menjadi *the action or manner governing*. Sementara itu, berarti *to rule with authority* atau mengatur atas nama kewenangan. Pelaksanaannya biasa disebut sebagai *government* yang selain mempunyai arti sempit sebagai *action of ruling and directing the affairs of a state*, atau pelaksanaan pengaturan dan pengarahan urusan-urusan negara. Dengan demikian *government* identik dengan pengelolaan atau pengurus dengan makna spesifik atau pengurus negara. Nugroho, (2004:207).

Sedarmayanti, (2004:3) menjelaskan tentang *Good Governance* sebagai, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta pemerintah yang efektif



dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Syafrudin dalam Akadun, (2007: 3) mengatakan ada beberapa asas yang penting diketahui dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pertama asas persamaan, berarti hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, disamping sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan berakar pada kesadaran hukum. Kedua, asas kepercayaan termasuk kedalam asas-asas hukum yang paling mendasar dalam hukum publik dan hukum perdata. Ketiga, asas kepastian hukum. Asas ini memiliki dua aspek yang satu lebih bersifat material, yang lain masih bersifat formal. Keempat, asas kecermatan. Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu ketepatan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Kelima, asas pemberian alasan berarti bahwa suatu ketetapan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasar. Keenam, larangan *detournement de pouvoir*, sebagai asas umum pemerintahan yang baik memandang suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk mana ia diberikan.

Kemudian Bappenas, (2018) menjabarkan *Good Governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintah yang baik, penyelenggaraan negara yang baik, atau pun administrasi yang baik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dunia usaha swasta dan masyarakat.

## 2) Jenis-jenis *Electronic Government*

Seperti halnya di dalam dunia aplikasi *e- Commerce* yang kerap diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu tipe B-to-B dan B-to-C, di dalam konsep *e-government* dikenal pula empat jenis klasifikasi menurut (Indrajit, 2016), yaitu: G-to-C, G-to-G, dan G-to-E.

Adapun segmen target untuk penerapan *e-government* diantaranya yaitu:

- a) G2G : Layanan infrastruktur TI bagi instansi pemerintah Kabupaten luwu timur di luar kendali struktural pemerintah daerah di antaranya : Kepolisian, KPU dan lain-lain.
- b) G2B : Layanan infrastruktur bagi kelompok usaha rintisan pemerintah daerah.
- c) G2C : Layanan infrastruktur pada area tertentu dalam daerah dalam rangka perluasan aksesibilitas masyarakat terhadap dunia maya.
- d) G2E : Layanan infrastruktur TI bagi internal pemerintah daerah di antaranya kepada OPD, kelurahan, puskesmas, dan lain-lain

### a. *Government to Citizen (G2C)*

*Government to Citizen (G2C)* merupakan sebuah teknologi informasi yang memiliki tujuan untuk mempererat hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan rakyat setara juga untuk memudahkan masyarakat dalam mencari berbagai

informasi penting tentang pemerintah. Tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).

b. *Government to Business (G2B)*

*Government to Business (G2B)* merupakan sebuah model hubungan pemerintah dengan bisnis. sebab sangat dibutuhkannya relasi yang sangat baik, antara pemerintah dengan pembisnis. Tujuan dari *Government to Business (G2B)* ialah demi kemudahan berbisnis masyarakat dengan para pembisnis.

c. *Government to Government (G2G)*

*Government to Government (G2G)* merupakan suatu web pemerintah yang dibentuk, bertujuan untuk memenuhi beberapa macam jenis informasi yang dibutuhkan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain dengan tujuan untuk mempermudah kerjasama antara pemerintah yang bersangkutan.

d. *Government to Employees (G2E)*

Merupakan suatu tipe hubungan yang diarahkan untuk para karyawan pemerintahan sebagai meningkatkan kinerja serta untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja disalah satu institusi pemerintah.

### C. Kerangka Fikir

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur khususnya di Kantor Bupati Luwu Timur dengan tujuan untuk mengetahui Penerapan E-government Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur. Adapun kerangka pikir yang digunakan merujuk pada teori Indrajit (2016) adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



Gambar.2.2 Karangka pikir

### D. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dideskripsikan, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan *e-government* dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur. Adapun

yang menjadi indikator penelitian ini adalah Dukungan (*Support*), Kemampuan (*Capacity*) dan Nilai (*Value*).

### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari fokus penelitian maka perlu untuk di deskripsikan bagaimana penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan itu sendiri . yakni sebagai berikut .

#### **1. Pendukung (*Support*)**

Pendukung yaitu adanya keinginan dari kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-government* dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur.

#### **2. Kemampuan (*Capacity*)**

Kemampuan yaitu adanya kemampuan pemerintah Kabupaten Luwu Timur meningkatkan pengelolaan sumberdaya finansial dalam melaksanakan program kerja di masyarakat, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

#### **3. Nilai (*Value*).**

Nilai yaitu adanya manfaat yang di berikan pemerintah atau kantor bupati Luwu Timur dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat Luwu Timur.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan lamanya. Peneliti memilih lokasi untuk melakukan penelitian di instansi pemerintah tepatnya di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui Penerapan E-Government Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami; data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, melalui pemaparan deskriptif analitik, tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi alami (Gunawan, 2013). Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara faktual objek yang akan diteliti terkait dengan Penerapan *E-Government* Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah tipe studi kasus, penelitian ini dilakukan berdasarkan kejadian yang terjadi dan untuk memberikan pemecahan

masalah sehingga dalam pelaksanaan penelitian tidak terbatas pada pengumpulan data. Dasar penelitian ini fokus pada Penerapan *E-Government* Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur.

### C. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penelitian secara langsung (dari tangan pertama) sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Menurut Sugiyono (2017), berdasarkan uraian tersebut maka sumber data dibedakan mejadi dua jenis yaitu;

#### 1. Data primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data yang diperoleh langsung dari para informan di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur melalui pengamatan (observasi) dan wawancara (interview).

#### 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, lewat orang lain atau dokumen. Data yang diperoleh dari pencatatan dokumen-dokumen atau arsip pada Kantor Bupati Kabaupaten Luwu Timur.

### D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang member informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informasi dalam penelitian

ini menggunakan teknik *prurposive sumpling*, yaitu teknik pengambilan *sampel* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul kriteria sebagai sampel)

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *prurposive sumpling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan di acak. Artinya menentukan informasi sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian

**Tabel 3.1 Data Informan Penelitian**

No.	Nama	Informan
1.	Ir. Nursih Hariani S.Sos	Ketua Administrasi
2.	Huma Hedra SE	Staf kantor
3.	Ahmad Khalik S.Sos	Staf kantor

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah penelitian untuk memperoleh hasil sesuai dengan kengunaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mendapatkan informasi terkait penelitian ini ialah sebagai berikut menurut (Sidiq et al., 2019).

##### **1. Observasi (Pengamatan)**

Dari definisi menurut Matthews and Ross dinyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indera manusia. Pengamatan langsung terhadap etika pemberilayanan kepada masyarakat. Definisi observasi dalam konteks situasi natural yang dimaksudkan oleh Matthews and Ross di atas mengacu kepada kancah riset kualitatif, yaitu



proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya.

## 2. Wawancara

Menurut Stewart & Cash, menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran/sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan di mana satu orang hanya bertugas untuk melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan. Definisi menurut Stewart & Cash di atas memiliki cakupan yang lebih luas. Mereka menyebutkan bahwa wawancara sesungguhnya adalah forum interaksi yang sangat dimungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara interviewer dan interviewee. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data dilapangan adalah tanya jawab dengan informan yang dipilih sebagai data penelitian. Dalam pengumpulan data dapat melalui rekaman agar dapat memudahkan peneliti mengingat hasil wawancara.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitian kualitatif

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi. Data yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data primer dan data sekunder. Adapun kegiatan teknik analisis data menurut Milles dan Huberman dalam (Umrati Hengki Wijaya, 2020) mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data bertujuan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi setiap data yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data tersebut diolah menjadi lebih bermakna sehingga memberikan gambaran yang jelas.

## 2. Penyajian Data

Dalam penyajian data adalah akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami selama penelitian berlangsung. Penyajian data bertujuan untuk menganalisis dan mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih kepada menyusun teks narasi deskriptif. Dalam penyajian data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, dan tabel.

## 3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

verifikasi. Kesimpulan, yang berupa tanggapan terhadap rumusan masalah. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang membahas suatu masalah.

## G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiono (2014) keabsahan data adalah konsep pokok yang diambil dari konsep kesahihan ( validasi ) dan keandalan (reliabilitas). Tingkat kepercayaan pengabsahan data (kredibilitas) dapat dilakukan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketentuan dalam pengamatan yang dimaksud yaitu menemukan ciri-ciri dan unsur dalam keadaan yang sangat relevan dengan peristiwa atau masalah yang ingin ditelusuri.

## **BAB IV**

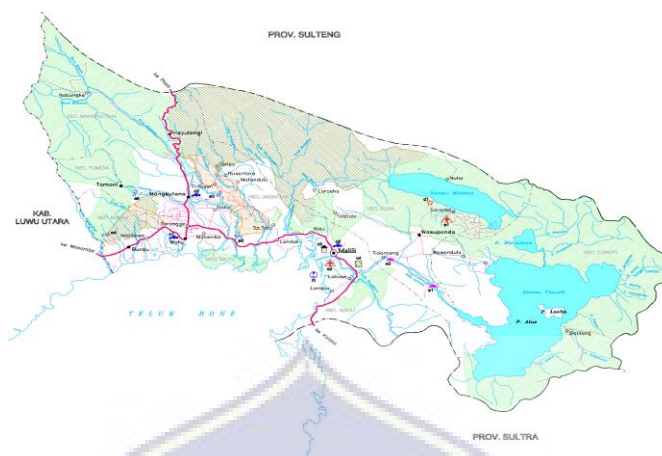
### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Objek Penelitian**

##### **1. Profil Kabupaten Luwu Timur**

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Sulawesi Tengah di sebelah utara dan timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan Teluk Bone di sebelah selatan. Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa di antara 2o03'00'' - 3o03'25'' Lintang Selatan dan 119o28'56'' - 121o47'27'' Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2021, berjumlah 296.741 jiwa. Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Bura dan Mangkutana.



*Gambar 4. Peta Kab. Luwu Timur*

Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur cukup luas. Jarak tempuh ibukota Kabupaten menuju ibukota kecamatan terjauh sekitar 61 kilometer yaitu Kecamatan Burau. Rata-rata jarak ibukota kecamatan ke ibukota Kabupaten sejauh 44,86 kilometer. Kabupaten Luwu Timur memiliki 5 danau dan 13 sungai. Hampir semua danau yang ada di Luwu Timur berada di Kecamatan Towuti kecuali Danau Matano yang terletak di Kecamatan Nuha. Danau yang terdalam adalah Danau Matano yang mencapai kedalaman sekitar 589 meter. Sedangkan danau terluas adalah Danau Towuti yang memiliki luas sekitar 585 km<sup>2</sup>. Sungai terpanjang di Luwu Timur adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km, sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km.

## **2. Administrasi Pemerintahan**

Wilayah Kabupaten Luwu Timur dibagi menjadi 11 kecamatan. Jumlah desa yang ada pada tahun 2015 sebanyak 124 desa dan

3 kelurahan. Kecamatan yang sudah memiliki kelurahan antara lain Kecamatan Tomoni, Kecamatan Malili dan Kecamatan Nuha. Jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Burau dan Towuti masing-masing 18 Desa, sedangkan Kecamatan Nuha memiliki desa paling sedikit yaitu 4 Desa dan 1 Kelurahan. Pada tahun 2015 terdapat 485 dusun dan 5 Rukun Warga di Kabupaten Luwu Timur.

Kecamatan Wotu memiliki jumlah dusun terbanyak yaitu sekitar 70 dusun, kemudian Kecamatan Burau dengan 66 dusun, Kecamatan Towuti sebanyak masing-masing 59 dusun. Pada tahun 2015, anggota DPRD Luwu Timur berjumlah 30 orang yang berasal dari 10 partai. Dari 30 orang anggota DPRD hanya 1 orang yang berjenis kelamin perempuan, yaitu dari PAN. Partai yang memiliki wakil terbesar adalah Partai Golkar (6 orang) yang mencapai 20 persen. Partai terbesar kedua adalah Partai NasDem, PAN dan Gerindra masing-masing sebanyak 4 orang atau sekitar 13,33 persen.

Dari postur jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), jumlah PNS terbesar adalah dengan tingkat pendidikan DIV-S1 yaitu 47,55 persen atau 2.162 orang, sedangkan tingkat pendidikan DI-D3 28,35 persen atau 1.289 orang. Lulusan S2 yang menjadi PNS di lingkup Pemerintah Daerah Luwu Timur mencapai 1,6 persen atau sebanyak 72 orang. Tahun 2015 tercatat sebanyak 4.546 orang PNS yang bertugas di dinas atau instansi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur. Pada Gambar dapat dilihat bahwa pegawai dengan tingkat golongan III memiliki persentase terbesar yaitu 52,16 persen atau 2.371 orang. Sedangkan golongan II sebesar 29,12

persen dan golongan IV sebesar 17,09 persen dengan banyak pegawai masing-masing 1.324 orang dan 777 orang. Sementara menurut jenis kelamin, jumlah PNS Pemda Luwu Timur terlihat perempuan lebih dominan. Sekitar 61,42 persen atau 2.792 orang PNS Pemda merupakan perempuan, sedangkan PNS laki-laki hanya 1.754 orang atau 38,58 persen saja dari total PNS Pemda Luwu Timur.

### **3. Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2016, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Luwu Timur adalah :

- (1) Sekretariat Daerah
- (2) Sekretariat DPRD
- (3) Inspektorat
- (4) Dinas Pendidikan
- (5) Dinas Kesehatan
- (6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (7) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- (8) Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- (9) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (10) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
- (11) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
- (12) Dinas Lingkungan Hidup
- (13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (15) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (16) Dinas Perhubungan
- (17) Dinas Komunikasi dan Informatika
- (18) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- (19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (20) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
- (21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- (22) Dinas Pertanian
- (23) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- (24) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- (25) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- (26) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (27) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- (28) RSUD I La Galigo
- (29) Kecamatan Burau
- (30) Kecamatan Wotu
- (31) Kecamatan Mangkutana
- (32) Kecamatan Tomoni
- (33) Kecamatan Tomoni Timur
- (34) Kecamatan Kalaena
- (35) Kecamatan Angkona
- (36) Kecamatan Malili
- (37) Kecamatan Wasuponda
- (38) Kecamatan Towuti
- (39) Kecamatan Nuha



#### 4. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data desa tahun 2015 mencapai jumlah 280.689 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 69.434 rumah tangga. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Malili sebesar 38.866 jiwa kemudian Kecamatan Towuti dengan 35.090 jiwa dan Kecamatan Burau sebanyak 34.902 jiwa.

Pada Tahun 2015 tercatat kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur sebesar 40 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan 298 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Wasuponda dan Mangkutana sebesar masing-masing 17 jiwa per km<sup>2</sup>. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Luwu Timur sebesar 105,73 yang artinya setiap 100 perempuan di Luwu Timur terdapat sekitar 105 laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Wasuponda yaitu sebesar 114,72 dan rasio jenis kelamin terendah di Kecamatan Wotu yaitu 102,38.

#### 5. Pendidikan

Salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan Sumber daya manusia (SDM) adalah pendidikan. Karena itu, kualitas SDM selalu diupayakan untuk ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas. SDM yang andal merupakan salah satu faktor keberhasilan

pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan diantaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Pada tahun 2015, untuk pendidikan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menyediakan sarana sekolah bagi masyarakat Luwu Timur. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) tersedia 144 unit SD Negeri, 10 SD Swasta dan 20 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tersedia 26 unit SLTP Negeri, 11 unit SLTP Swasta dan 23 Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tersedia 13 unit SLTA Negeri, 6 unit SLTA Swasta dan 9 Madrasah Aliyah (MA). Selain itu juga tersedia 4 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mendapatkan sumber daya manusia yang siap kerja. Pada tingkat sekolah tinggi, di Kabupaten Luwu Timur juga tersedia 2 unit Akademi yang berada di Kecamatan Wotu dan Kecamatan Nuha.

## **6. Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tiga dimensi utama yaitu daerah pantai, dataran sampai ke daerah yang berbukit. Sebagian besarnya didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha). Hal ini menggambarkan suatu daerah menyimpan potensi kandungan sumber daya alam yang melimpah. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan aset pengembangan dimasa yang akan datang, berdasarkan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Potensi ketersediaan lahan masih luas, di mana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
- b. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi Kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan. Di mana kondisi eksisting menunjukkan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 62,46 % dari total luas Kabupaten Luwu Timur.
- c. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata, khususnya sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan peribadatan.
- d. Potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur. Pengembangan bidang pertambangan :
  - (a) Nikel terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha.
  - (b) Batu koral terdapat di Desa Tabarano Kecamatan Nuha, Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Desa Margo Lembo Kecamatan Mangkutana dan Desa Jalajja Kecamatan Burau.

(c) Pasir terdapat di Desa Lioka, Loeha, Tokalimbo Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu, Puncak Indah, Balantang Kecamatan Malili, Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni, Desa Kasintuwu, Margo Lembo, Pertasi Kencana, Wonorejo Kecamatan Mangkutana, dan Desa Jalajja, Lumbewe Kecamatan Burau.

(d) Tanah Liat terdapat di Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu Kecamatan Malili, Desa Lera Kecamatan Wotu, dan Desa Lanosi Kecamatan Burau.

(e) Kaolin terdapat di Desa Asuli Kecamatan Towuti.

(f) Pasir Kwarsa terdapat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.

Sedangkan Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan potensi unggulan daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Hutan Produksi

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah hutan memiliki potensi yang besar untuk dikelola dengan baik di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2012 tercatat luas kawasan hutan seluas 541.591,30 Ha, hutan lindung 238.589,52 Ha, kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebesar 179.552,45 Ha, dan kawasan hutan produksi yang terdiri dari :

- (1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Angkona, Malili, Nuha, Towuti dan Wasuponda dengan luas 96.554,38 Ha;
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Angkona, Malili, Mangkutana, Tomoni dan Wasuponda dengan luas 9.135,32 Ha; dan
- (3) Kawasan hutan produksi konversi di Kecamatan Burau, Mangkutana dan Tomoni dengan luas 17.759,63 Ha.

b. Kawasan Pertanian

Kabupaten Luwu Timur masih mengandalkan Sektor pertanian sebagai motor penggerak utama perekonomian masyarakat. Dengan melihat struktur perekonomian daerah di mana pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB secara agregat sektor ini mampu memberikan kontribusinya sebesar 57,08% jika sektor pertambangan dan penggalian tidak dimasukkan dalam hitungan. Potensi ketersediaan lahan masih luas, di mana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian hal ini sejalan dengan visi Kabupaten pengembangan Agroindustri. peruntukan kawasan pertanian diarahkan pada :

- (1) Kawasan pertanian tanaman pangan yang berpotensi budi daya padi sawah yang tersebar di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Wasuponda dan Towuti.

- (2) Kawasan pertanian hortikultura yang berpotensi budi daya pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- (3) Kawasan perkebunan yang berpotensi tanaman tahunan/perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan; dan
- (4) Kawasan peternakan yang berpotensi peternakan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

c. Kawasan Pertambangan

Karakteristik wilayah yang sebagian besar terdiri dari pegunungan membuat kandungan potensi sumber daya mineral di Kabupaten Luwu Timur sangat besar, kontribusi sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan nilai PDRB yang nilainya mencapai (75,83 persen dari total PDRB tahun 2012) menjadikan pertumbuhan ekonomi wilayah ini sangat dipengaruhi oleh naiknya produksi Nikel. Kawasan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur termasuk ke dalam salah satu kawasan strategis Nasional (KSN Sorowako)

d. Kawasan Pariwisata.

Secara umum Kabupaten Luwu Timur memiliki kawasan pariwisata hampir tersebar di semua kecamatan yang bervariasi jenisnya antara lain obyek wisata alam, budaya dan bahari yaitu :

- (1) Kawasan TWA Danau Matano dan Danau Mahalona seluas 18.660,97 ha dan TWA Danau Towuti seluas 56.370,66 ha;

- (2) Obyek wisata untuk pendidikan yaitu Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KDHTK) seluas 731,48 Ha di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili dan Kebun Raya Wallacea seluas 150 ha di Kecamatan Nuha;
- (3) Kawasan wisata bahari dan wisata pantai meliputi Wisata Pantai Lemo di Kecamatan Burau, Batu Menggoro di Desa Harapan Kecamatan Malili, dan Pesona Bawah Laut Bulu Poloe di Kecamatan Malili;
- (4) Kawasan wisata alam, meliputi air terjun Mata Buntu di Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda, air terjun Atue di Desa Atue Kecamatan Malili, permandian alam Mantadulu di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona, air terjun Salu Anuang di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana, permandian air panas di Desa Cendana dan Gua Kelelawar di Desa Batu Putih Kecamatan Burau.

## 7. Visi & Misi

### ***“LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021”***

Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2021 Luwu Timur merupakan daerah terkemuka dibanding Kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang terkemuka tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri. Dalam khazanah bahasa daerah, kondisi tergambarkan dalam frasa *“Wanua Mappatuo Naewa i*

*Alena*". Artinya, "negeri menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya". Maju, sejahtera dan mandiri ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumber daya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan pernyataan visi ini terkandung tiga pokok visi yakni maju, sejahtera dan mandiri. Artinya, Luwu Timur pada tahun 2021 akan terkemuka dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan dalam hal kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian. Indikator umum sebagai daerah terkemuka adalah indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur yang nilainya berada pada ketegori menengah-atas dan dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan berada pada posisi minimal tiga besar.

**"Maju"** adalah kondisi di mana Kabupaten Luwu Timur kualitas manusia yang tinggi. Indikatornya adalah indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang tinggi.

**"Sejahtera"** adalah kondisi di mana Kabupaten Luwu Timur memiliki masyarakat yang kemakmuran ekonominya tinggi, kesejahteraan sosialnya tinggi, kemiskinannya rendah serta ditopang oleh perikehidupan yang religius. Indikatornya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan daya beli masyarakat.

**"Mandiri"** adalah kondisi di mana Kabupaten Luwu Timur memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing tinggi ini ditandai dengan



berfungsinya sejumlah infrastruktur yang mendorong berkembangnya iklim investasi yang atraktif, terpenuhinya fasilitas ekonomi yang memadai, terutama bandar udara dan pelabuhan laut sebagai infrastruktur pokok dalam keterbukaan dengan dunia luar melalui pergerakan manusia dan barang, dan didukung oleh etos masyarakat yang tinggi untuk mandiri.

Misi :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.
- b. Mendorong peningkatan investasi daerah
- c. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi.
- e. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.
- f. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik
- g. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- h. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah

## **B. Hasil Penelitian**

Peneliti melakukan analisis menurut tujuan penelitian yang ingin di peroleh dalam tempat penelitian, berikut merupakan hasil analisis dari data dan fakta yang ada di lapangan dengan prespektif legalistik dan teoretis yang akan disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Penerapan E-Government Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan teori E-Government yang dikutip Indrajit dalam bukunya “ Electronic Government” yang meliputi dari *Support, Capacity, dan Value*.

### **1. Support**

#### **a. Aturan dan Kebijakan Pemerintah**

Pengembangan *e-government* diperlukan aspek penting yang menjadi salah satu awal dari inisiatif pengembangan *e-government* yaitu standar yang telah disepakati oleh pemegang kekuasaan publik dan dilaksanakan dengan SOP yang ada. Kebijakan yang mendasari pembangunan *e-government* tersebut di mulai dari UUD 1945 pasal 28F yang menjelaskan tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan mengelola informasi sampai terbentuknya kebijakan *e-government* sesuai dengan daerah masing-masing seperti kebijakan yang dirumuskan dan direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kedalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dalam regulasi tersebut di jelaskan seputar aturan yang mengatur PPID ( Pejabat Pengelola Informasi Daerah ), Informasi yang dibatasi , dan beberapa hal lainnya. Penerapan kebijakan e-government tersebut sudah di buat dan di jalankan, namun masih kurang maksimal dalam penerapannya.

#### **b. Partisipasi Pemerintah**

Diskominfo Kabupaten Luwu Timur dalam menerapkan e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, tentu di dukung oleh pihak pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dapat terlihat dari adanya kesepakatan dalam membentuk e-government yang menghasilkan regulasi hukum yang mengatur seputar e-government dalam pelayanan informasi publik, sumber daya yang mendukung mensukseskan konsep e-governmet tersebut, dan penerapannya. Diskominfo memiliki yang namanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Luwu Timur yang di atur dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media. Penjabaran teknis pengelolaan PPID Kabupaten dan OPD tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur No. 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki tugas sesuai dengan

struktur dan tupoksi yang diatur salah satunya penerapan *e-government*. Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki tugas sesuai dengan struktur dan tupoksi yang diatur salah satunya penerapan *e-government*. Pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Luwu Timur telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi dan dokumentasi publik, terdiri dari:

- 1) Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi secara langsung ke Kementerian Dalam Negeri (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
  - a) 4 kursi tamu
  - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
  - c) 2 unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
  - d) 2 unit telepon
  - e) 2 unit lemari arsip
  - f) 1 filling cabinet
- 2) Portal/website Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat selaku pemohon informasi melalui laman <http://kominfo.Luwu.Timur.go.id/wp/>.



Gambar 3. Sistem informasi musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Timur Sumber: Diskominfo Kabupaten Luwu Timur 2017

- 3) Portal/website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Luwu Timur yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat selaku pemohon informasi melalui laman <http://ppidluwutimur.com/>.



Gambar 4. Website Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sumber: Diskominfo Kabupaten Luwu Timur 2018

- 4) Aplikasi “LAPOR ” dimana aplikasi ini merupakan pelayanan publik berbasis online yang telah di update dengan sebuah sistem terbaru dengan menggunakan metode 6 berita utama yang akan tampil dalam halaman utama. Melalui website dan aplikasi tersebut, sangat membantu dan efektif. terlihat dari fungsinya yang

telah mengkomodir pengajuan keberatan informasi untuk kemudian disampaikan kepada atasan PPID, hingga pengajuan sengketa informasi yang secara otomatis akan disambungkan dari sistem aplikasi LAPOR ke Bidang layanan sistem komunikasi dan informasi publik untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya di tindak lanjuti. Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu bukti kepedulian pemerintah dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk sarana dan prasarana termasuk e-government. Sarana dan prasarana yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk fisik namun termasuk dalam jaringan seperti internet dan server. Namun dalam pelaksanaan e-government tersebut pihak Diskominfo masih membutuhkan yang namanya server/ database.

## **2. Capacity**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Pegawai atau juga bisa disebut dengan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mensukseskan e-government dalam pelayanan informasi publik di dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bulungan. Pegawai yang dimaksud merupakan pegawai yang memiliki kemampuan dan skill yang dibutuhkan dalam penerapan e-government tersebut. Namun fakta di lapangan yang terjadi, pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi masih di bilang cukup kurang.

### b. Sumber daya keuangan

No.	Uraian	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1/ D IV	D III	D I	SLTA	SLTP	SD	
1	Struktural									
	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Kepala Bidang	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	Kasi	-	2	3	1	-	-	-	-	6
	Kasubbag	-	-	1	-	-	1	-	-	2
	<b>Sub Jumlah</b>	-	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>12</b>
2	Non Struktural	-	-	-	1	-	8	1	-	11
	<b>Sub Jumlah</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>8</b>	<b>1</b>	-	<b>11</b>
3	Honorer	-	-	4	-	-	5	-	-	9
	<b>Sub Jumlah</b>	-	-	<b>4</b>	-	-	<b>5</b>	-	-	<b>9</b>
<b>Jumlah</b>		-	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	-	<b>14</b>	<b>1</b>	-	<b>32</b>

### c. Infrastruktur Jaringan

Faktor lainnya yang mendukung mewujudkan e-government dalam pelayanan informasi publik yaitu sumber daya peralatan / Infrastruktur Suatu program tidak akan berjalan jika tidak memiliki alat untuk menjalankan program tersebut. Infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini bisa dalam bentuk fisik atau non fisik.

**Tabel 4. Infrastruktur Jaringan Diskominfo Kabupaten Luwu Timur**

Jaringan Internet						
Memiliki Koneksi Internet	Total Bandwith Internet (Mbps)	Nama Provider Internet	Peforma Jaringan Internet Secara Umum	Memiliki Koneksi LAN	Peforma LAN secara Umum	Layanana wifi yang digunakan oleh masyarakat
Ya	20	Indihome (Telkom)	Lancar	Ya	Lancar	Ya

Sumber :Diskominfo Kabupaten Luwu Timur 2021

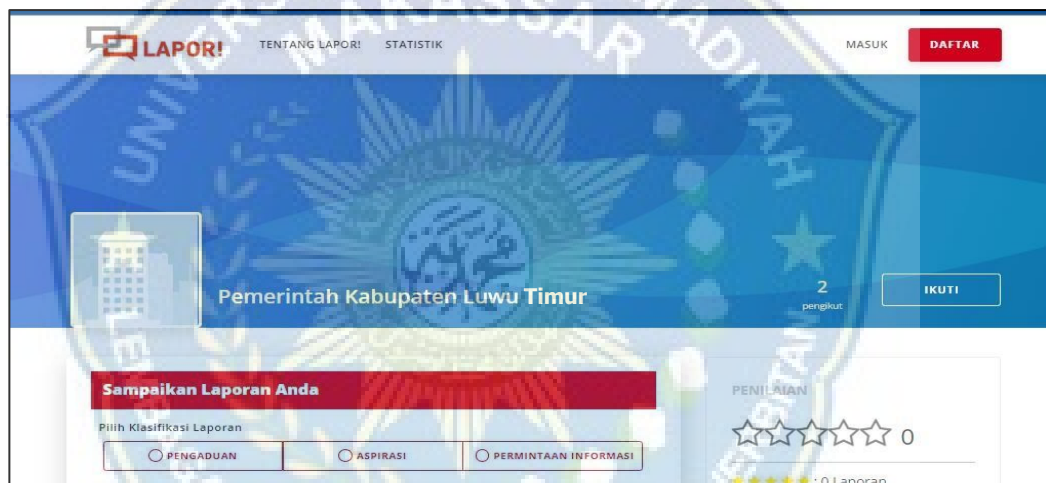
Tabel tersebut di jelaskan bahwa Diskominfo sudah memiliki koneksi internet yang menggunakan provider internet dari Indihome yang stabil di gunakan untuk 3-8 orang yaitu 20 Mbps, jika ingin di gunakan untuk lebih banyak orang, akan lebih baik di tingkatkan Bandwith internet tersebut. Peforma Koneksi LAN yang digunakan oleh Diskominfo termasuk golongan lancar, yang dimana Hardware hingga Software dapat terkoneksi dengan sinergi lewat jaringan lokal antar komputer. Namun masih terdapat beberapa daerah yang mengalami blank spot dikarenakan kondisi geografis yang tidak mendukung dan Faktor cuaca yang buruk, oleh sebab itu perlunya integrasi jaringan yang di dukung dengan penyediaan internet, BTS ( Base Transceiver Station ), dan Backbone Fiber yang menjadi tugas pihak Diskominfo.Kabupaten Luwu Timur.

#### 4. Value

Pelaksanaan suatu ketentuan-ketentuan tidak terlepas dari kuantitas manfaat yang diperoleh. Dalam penerimaan besar tidaknya manfaat atau nilai yang diperoleh, tentu bukan pemerintah sendiri yang menentukan tapi juga masyarakat yang menikmati dan menerima hal tersebut. Kebijakan egovernment tentunya memiliki manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai penerima layanan dan pelaku sebagai pelaksana. Oleh sebab itu pemerintah harus teliti dalam memilih dan mennggunakan aplikasi apa dalam memeberikan manfaat kepada masyarakat.



Penerapan e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah di kantor bupati Luwu Timur di Diskominfo Kabupaten Luwu Timur, memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Dengan adanya website Kabupaten dan aplikasi berbasis mobile, masyarakat dapat mengikuti dan update seputar tentang informasi pemerintahan dan lingkungan pemerintahan. Masyarakat juga dapat memberikan kritik dan saran melalui website dan aplikasi LAPOR di kolom komentar / saran.



Gambar 5. Inovasi layanan pengaduan "LAPOR" Sumber: Diskominfo Kabupaten Luwu Timur 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang ditunjukkan berdasarkan tujuan penelitian dan fokus penelitian yang ada menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di kantor bupati Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Indikator support, Diskominfo Kabupaten Luwu Timur sudah mengaplikasikan e-government sebagai tata kelola pemerintahan di kantor bupati Kabupaten Luwu Timur baik dari segi aturan yang mengatur, partisipasi dengan pemerintah dalam penerapan e-government.
2. Indikator Capacity, Diskominfo Kabupaten Luwu Timur memiliki sumber daya manusia, sumber daya keuangan, infrastruktur jaringan yang belum optimal. Ini disebabkan karena faktor sumber daya manusia yang kurang kompeten, dukungan anggaran yang membatasi pelaksanaan program serta kepedulian masyarakat yang masih rendah.
3. Indikator Value, manfaat dalam pelayanan informasi publik baik secara offline maupun online yang dilakukan oleh diskominfo sudah di laksanakan secara maksimum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah itu sendiri, begitu juga masyarakat.

## B. Saran

Demi tercapainya tujuan penerapan e-government, maka perlu diupayakan hubungan yang seirama dan harmonis pada semua lini, baik dari masyarakat, staf pelaksana dan pimpinan semua OPD sekaligus Bupati sebagai penanggung jawab *e-government*. Terkait dengan hasil penelitian “Penerapan E-Government Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur”, maka ada beberapa saran yaitu Kemampuan sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan setiap saat, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang terus secara pesat. Peningkatan kerjasama antar OPD dapat terintegrasi secara maksimal. Memperbanyak penyediaan sarana dan prasarana penunjang penerapan *e-government* serta pengalokasian anggaran yang harus ditingkatkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, S. (2005). *Dimensi lingkungan perencanaan pembangunan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*. *Electronic Government*, 84.
- Kartono Kartini. (2010). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Kurniasih, Y., & Wismaningtyas, T. A. (2020). *Smart City Kota Magelang : Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Electronic Governance*. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(2), 356.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Bab VII pemanfaatan teknologi informasi pasal 53.
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Kurniasih, Y., & Wismaningtyas, T. A. (2020). *Smart City Kota Magelang : Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Electronic Governance*. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(2), 356.
- Mariono, S. (2019). *Penerapan E- Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Muammar, M. A., Parawu, H. E., & Haq, N. (2019). *Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Informatika Dan Statistik Kabupaten Wajo*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 414-426.
- Nugraha, J. T. (2018). *E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang elemen sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)*. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.
- Nugroho, T. (2016). *Analisis E- government Terhadap Pelayanan Publik Di Kementerian Hukum Dan Ham (Analysis of E- government to Public Services in the Ministry of Law and Human Rights)*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(3), 279–296.
- Parawu, H. E. (2020). *Efektivitas Pemanfaatan Electronic Government Guna Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Badan Usaha Milik Negara*. *Journal Publicuho*, 3(3), 311



## LAMPIRAN 1. Surat Pengantar Penelitian

	<b>Universitas Muhammadiyah Makassar</b> <small>Integrity · Professionalism · Entrepreneurship</small>	<b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b> Faculty of Social and Political Sciences <small>Menara Iqra Lantai 5 · Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221          Telp. (0411) 866.977 Fax: (0411) 865.588          Official Email: fisp@unismuh.ac.id          Official Web: http://fisp.unismuh.ac.id</small>
		
Nomor	: 1016/FSP/A.1-VIII/VI/1443 H/2022 M	
Lamp.	: 1 (satu) Eksamplar	
Hal	: <b>Pengantar Penelitian</b>	
<p>Kepada Yth          Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan          Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh          Di          Makassar</p> <p>Assalamu Alaikum Wr. Wb.</p> <p>Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diherapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :</p>		
Nama Mahasiswa	Elmawati	
St a m b u k	10561 11174 18	
J u r u s a n	Ilmu Administrasi Negara	
Lokasi Penelitian	Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur	
Judul Skripsi	"Penerapan E-Government dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur"	
<p>Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.</p> <p>Jazakumullahu Khaeran Katziraa</p> <p>Wassalamu Alaikum Wr. Wb.</p>		
Makassar, 20 Juni 2022 Dekan  <b>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</b> NBM : 790 727		
		
	Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia Progress for the Nation and Humankind	Ilmu Administrasi Negara Public Administration - G



## LAMPIRAN 2. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56  
 email : [kppt@luwutimurkab.go.id](mailto:kppt@luwutimurkab.go.id) | website : [dpmptsp.luwutimurkab.go.id](http://dpmptsp.luwutimurkab.go.id)  
**MALILI, 92981**

---

Malili, 14 Juli 2022

Nomor : 070/150/DPMPSTP-LT/2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
 Yth. Bupati Luwu Timur  
 Di -  
 Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 14 Juli 2022 Nomor 150/KesbangPol/VII/2022, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **ELMAWATI**  
 Alamat : Dsn. Kalatiri, Ds. Kalatiri, Kec. Burau  
 Tempat / Tgl Lahir : Palopo / 23 April 1999  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Nomor Telepon : 085325942911  
 Nomor Induk Mahasiswa : 105611117418  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara - (S1)  
 Lembaga : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

**"PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH DI KANTOR BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR"**

Mulai : 14 Juli 2022 s.d. 14 September 2022

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



A.n Bupati Luwu Timur  
 DPMPSTP



Pangkas Jnru, SE  
 Pembina Utama Muda (IV.c)  
 NIP. : 19641231 198703 1 208

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Dekan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR di Tempat;
5. Sdr. (I) ELMAWATI di Tempat.

**LAMPIRAN 3. Dokumentasi**







## LAMPIRAN 4. Surat Bebas Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

*Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588*

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Elmawati  
NIM : 105611117418  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	3 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Januari 2023  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursmah, S.Hum., M.I.P.  
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

# BAB I Elmawati - 105611117418

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jan-2023 08:37AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1998124846

**File name:** BAB\_I\_58.docx (23.83K)

**Word count:** 1290

**Character count:** 8956



## BAB I Elmawati - 105611117418

## ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	1%
2	<a href="https://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id">ejournal.poltekkes-smg.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes

Or

Exclude matches

Exclude bibliography

On

off



# BAB II Elmawati - 105611117418

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jan-2023 08:38AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1998125267

**File name:** BAB\_II\_134.docx (159.61K)

**Word count:** 4107

**Character count:** 28033

## BAB II Elmawati - 105611117418

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%
4	Yana Suharyana. "IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN", Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 2017 Publication	1%
5	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	1%
7	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%



8	Submitted to University of the Philippines - Manila Student Paper	<1%
9	Submitted to UIN Jambi Student Paper	<1%
10	Submitted to Politeknik STIA LAN Student Paper	<1%
11	id.scribd.com Internet Source	<1%
12	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
13	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On



# BAB III Elmawati - 105611117418

by Tahap Tutup

**Submission date:** 24-Jan-2023 08:39AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1998125517

**File name:** BAB\_III\_56.docx (24.21K)

**Word count:** 1013

**Character count:** 6962



## BAB III Elmawati - 105611117418

## ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<b>4%</b>
<b>2</b>	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<b>3%</b>
<b>3</b>	repository.ub.ac.id Internet Source	<b>3%</b>

Exclude quotes  Or  Exclude matches  2%

Exclude bibliography  Or



# BAB IV Elmawati - 105611117418

by Tahap Tutup

**Submission date:** 24-Jan-2023 08:41AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1998127231

**File name:** BAB\_IV\_56.docx (621.06K)

**Word count:** 3565

**Character count:** 21563

### BAB IV Elmawati - 105611117418

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[eprints.ipdn.ac.id](http://eprints.ipdn.ac.id)

Internet Source



8%



Exclude quotes

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography



# BAB V Elmawati - 105611117418

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jan-2023 08:42AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1998127639

**File name:** BAB\_V\_65.docx (20.05K)

**Word count:** 396

**Character count:** 2538



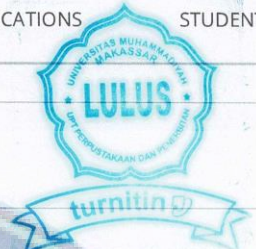
### BAB V Elmawati - 105611117418

ORIGINALITY REPORT

**4%** SIMILARITY INDEX      **4%** INTERNET SOURCES      **0%** PUBLICATIONS      **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<b>2%</b>



Exclude quotes  On      Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  On



## RIWAYAT HIDUP



Elmawati Lahir pada tanggal 23 April 1999, di Palopo Penulis merupakan anak Ke dua dari Empat bersaudara, dari pasangan Bapak Muh. King dan Ibu Hasna penulis pertama bersekolah di SDN 112 LEMO tamat pada Tahun 2012. Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Burau kemudian tamat pada tahun 2015. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 7 Luwu Timur dan tamat pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis mendaftar sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik program studi Ilmu Administrasi Negara melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2023 penulis mendapat gelar S1 (A.AP) pada Program Ilmu Administrasi Negara Dengan Judul Penerapan E-government Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur.